

## **ABSTRAK**

# **AKUNTABILITAS DINAS TATA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENDIRIAN POM BENSIN KECAMATAN METRO PUSAT**

**Oleh**

**Aris Agung Prabowo**

Pembangunan sejumlah SPBU belakangan ini dinilai mengabaikan aspek keamanan. Misalnya, berlokasi di tengah permukiman padat dan tidak ada lahan kosong yang memisahkan SPBU dengan rumah atau bangunan lain di sekitarnya (*Suara Merdeka*, 2/1). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendirian sebuah pom bensin di tengah pemukiman masyarakat yang padat harus benar-benar terpenuhi. Salah satunya adalah antisipasi masalah dampak lingkungan atau amdal dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro sebagai penanggungjawabnya dan masyarakat sekitar harus mengetahui benar bagaimana penanggulangan masalah lingkungan yang akan terjadi jika pom bensin didirikan sebelum mereka menandatangani surat persetujuan pendirian pom tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup dalam Pendirian POM Bensin Kecamatan Metro Pusat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa sebagai bentuk akuntabilitas dan terkait transparansinya sudah cukup baik, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program dan akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat sudah cukup dilaksanakan serta ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil mampu dilaksanakan dengan baik dan dapat disimpulkan sudah akuntabel.

## **ABSTRACT**

### **DEPARTMENT ACCOUNTABILITY PROCEDURES FOR CITY PLANNING AND ENVIRONMENT IN THE ESTABLISHMENT CENTER METRO DISTRICT GAS STATION**

By

Aris Agung Prabowo

Construction of a gas station recently assessed to ignore the security aspect. For example, located in the middle of dense settlements and there is no vacant land that separates the gas station to home or other buildings around it (Suara Merdeka, 2 / 1). These facts indicate that the establishment of a gas station in the middle of a dense residential community should really be fulfilled. One is the anticipated environmental impacts or environmental impact issues with the Department of City Planning and the Environment as responsible, City Metro and surrounding communities need to know exactly how to overcome environmental problems that would occur if the gas station was established before they signed a letter of approval from the establishment of such a gas.

The purpose of this study are to identify accountability Department of City and Environment in Sub Gas Station Establishment Metro Centre. To achieve these objectives, the types of research used in this study was a descriptive study using qualitative methods. In this case the data collection is done through observation,

interview and documentation. Subsequently, the collected data were analyzed using qualitative data analysis method, which consists of data reduction, data presentation and verification.

Based on the research, dissemination of information regarding a decision by the mass media as a form of accountability and transparency related is good enough, the accuracy and completeness of the information related to ways of achieving the target of a program and public access to information for a decision after the decision was made and the complaint mechanism community have been fairly conducted and the availability of management information systems and monitoring results can be performed well and it can be concluded already accountable.